

## PERAN GURU DALAM MEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKESADARAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari

ulfamas@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Abstrak

*Berbagai krisis multidimensi yang ada di Indonesia, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di masyarakat. Keragaman kultur seharusnya bukan menjadi penyebab adanya diskriminasi, ketidakadilan, kecurigaan dan berbagai pelanggaran HAM, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Membangun kesadaran sebagaimana diatas tidaklah mudah, harus dengan usaha yang sungguh sungguh dan berkesinambungan. Salah hal yang dapat dilakukan untuk mendorong kesadaran multikultural adalah melalui pendidikan. Berdasar hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam membangun pendidikan yang berkesadaran multikultural di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pendidikan, pemikiran multikulturalisme harus diturunkan dalam berbagai term penting yang menjadi penyokong kokohnya kebhinekaan yang ada di Indonesia. Dengan penerapan pendidikan multikultural, diharapkan guru mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di tengah realitas kebangsaan kita yang penuh dengan kebhinekaan. Terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan guru untuk membangun pendidikan berkesadaran multikultural yaitu membangun sikap equality, mendorong demokrasi substansial, dan membangun kesadaran gender.*

**Kata-kata kunci:** pendidikan, multikultural, guru, demokrasi, gender

### Abstract

*Various multidimensional crises that exist in Indonesia, recognized or not they are the part of the cultural problem which is one of the reasons is the diversity of the cultures that existed in society. The diversity of culture should not be the cause of the existence of discrimination, injustice, suspicion and a variety of human rights violations, but being the power to build a sense of community. Build awareness as above is not easy; it should be with an earnest effort and continuous improvement. One thing that can be done to encourage multicultural awareness is through education. Based on the foregoing, the purpose of this research is to find out how the role of the teacher in developing education with multicultural awareness in Indonesia. This research is a library research is which the data collection was done by gathering the data from a variety of literature. The results showed that in the aspect of education, thinking of multiculturalism should be break down in a variety of important terms that become a strong supporter in promoting diversity that exists in Indonesia. With the implementation of multicultural education, teachers are expected to able to encourage learners to have an awareness and understanding to always uphold the values of Justice, democracy, humanity and pluralism in the association in the middle of our national reality that is full of diversity. There are three important things that must be done by the teacher to build an education with multicultural awareness they are: build an attitude of equality, support the substantial democracy, and build gender awareness.*

**Keywords:** education, multicultural, teacher, democracy, gender

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang sangat beragam, baik dari sisi etnis, agama maupun budaya (Latif, 2011). Ditinjau dari etnisitas Indonesia terdiri lebih dari 101 etnis dengan beragam bahasa yang dimiliki yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari sisi agama, keragaman agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai kepercayaan lokal lainnya. Keragaman tersebut merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia, akan tetapi di sisi lain keragaman tersebut menjadi rawan terjadinya konflik sosial yang bersifat komunal.

Setelah reformasi 1998, keragaman kultur di Indonesia tersebut mulai mendapatkan ujian yang serius. Berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Sambas, Ambon dan Poso yang membahayakan kebersamaan masyarakat Indonesia. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak bisa dianggap remeh, sebab besar kemungkinan akan menyulut konflik di daerah lainnya. Oleh sebab itu, harus segera diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional (Yaqin, 2005). Terdapat empat faktor yang mendorong adanya budaya kekerasan di Indonesia, yaitu: *pertama*, kegagapan budaya. *Kedua*, akumulasi kebencian dalam masyarakat yang diawali dari *prejudice* yang salah terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, masyarakat Indonesia telah terjebak dalam budaya intoleran, tidak menerima pluralitas tradisi, cara berkomunikasi, cara pandang terhadap kehidupan dan tekanan terhadap tradisi. *Keempat*, politik yang tidak berpihak kepada keadilan yang dijalankan oleh Orde Baru, karena politik yang dijalankan adalah bentuk pelestarian budaya kekerasan yang dilembagakan (Huda, 2005). Melihat berbagai konflik yang ada dibutuhkan pemahaman yang mendasar mengenai kehidupan bersama dalam kultur yang berbeda, yang sering disebut dengan istilah multikultural (Suparlan, 1997).

Multikulturalisme ini erat kaitannya dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Membangun kesadaran sebagaimana di atas tidaklah mudah, harus dengan usaha yang serius dan berkesinambungan. Perlu disadari bahwa hal yang lebih penting dari sikap inklusif tersebut adalah mengembangkan sikap multikulturalisme. Sikap ini ditunjukkan setiap anggota masyarakat sekedar mengakui bahwa tidak hanya mengakui beragam atas perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi juga mendorong masing-masing umat untuk berkontribusi secara aktif terhadap proses-proses kehidupan bersama.

Multikulturalisme yang pada dasarnya merupakan pandangan dunia (*world view*) yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang

menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Meminjam istilah Bikhu Parekh, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997).

Multikulturalisme secara umum juga menjadi sebuah istilah yang menunjukkan pada masyarakat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang tidak sama. Munculnya istilah ini erat kaitannya dengan semakin nampaknya gejala diferensiasi dalam masyarakat saat ini. Secara horisontal diferensiasi masyarakat multikultural tampak dalam perbedaan fisik atau ras, suku bangsa, agama, dan jenis kelamin, sedangkan perbedaan individu atau kelompok secara hirarkis dalam kelas-kelas yang berbeda tingkatan dalam suatu sistem sosial merupakan wujud stratifikasi masyarakat multikultural. Diferensiasi dan munculnya stratifikasi masyarakat ini terjadi karena adanya faktor-faktor, seperti latar belakang historis, kondisi geografis atau bisa jadi karena keterbukaan terhadap kultur masyarakat lain yang kemudian berasimilasi dengan kebudayaan setempat sehingga membentuk kebudayaan yang tampak baru.

Persoalan diatas menunjukan bahwa umat beragama di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan terkait pluralisme agama dan konflik intern atau antar agama. Kondisi demikian tampaknya semakin menyadarkan bangsa Indonesia betapa pentingnya keterlibatan agama-agama dalam memperhatikan dan mengupayakan penyelesaian secara bersama-sama. Keterlibatan agama semacam ini perlu dilakukan mengingat bahwa sebuah keyakinan tidak hanya cukup diikrarkan dan diwujudkan dalam bentuk ritualnya saja, melainkan juga menuntut upaya konkret setiap individu dalam kehidupan sosialnya (Rozi, 2006). Oleh sebab itu diperlukan sikap moderat yang menuntut adanya kesadaran diri, dalam pengertian mengenal diri, bangsa, sejarah dan budayanya sendiri.

Seluruh warga negara haruslah kembali menggali khasanah kearifan lokal (*local wisdom*) sendiri yang selama ini diabaikan. Agama dan kearifan lokal lainnya yang dimiliki, harus dikembangkan untuk tujuan mengangkat harkat dan martabat masyarakat, serta demi terciptanya tata kehidupan global yang lebih baik. Indikasi dari berhasilnya upaya ini adalah adanya komitmen terhadap budaya *non-violence*, adanya komitmen terhadap budaya solidaritas dan keadilan ekonomi, adanya komitmen terhadap budaya toleran dan hidup saling mempercayai, dan terakhir adanya komitmen terhadap persamaan hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

Membangun kesadaran sebagaimana diatas tidaklah mudah, harus dengan usaha yang sungguh sungguh dan berkesinambungan. Beruntung selama ini telah banyak para aktifis pluralisme yang mengembangkan sikap inklusif dan pluralis. Namun perlu disadari bahwa lebih penting dari sikap inklusif tersebut adalah mengembangkan sikap multikulturalisme. Sikap ini ditunjukkan setiap anggota masyarakat sekedar mengakui kita beragam atas perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi juga mendorong masing-masing umat untuk berkontribusi secara aktif terhadap proses-proses kehidupan bersama. Salah hal yang dapat dilakukan untuk mendorong kesadaran multikultural adalah melalui pendidikan.

Pemikiran multikulturalisme dalam aspek pendidikan harus diturunkan dalam berbagai *term* penting yang menjadi penyokong kokohnya kebhinekaan yang ada di Indonesia, antara lain: jaminan kebebasan dalam beragama, jaminan adanya perlindungan akan hak-hak dasar kemanusiaan (*basic right*), budaya yang demokratis, dan perlindungan terhadap kalangan minoritas (Suseno, 2003). Lebih lanjut, sikap terbuka, toleransi, anti terhadap kekerasan merupakan nilai dasar yang harus dikembangkan sebagai ujung tombak dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Pemikiran multikulturalisme yang ada di Indonesia disandarkan salah satunya pada Islam sebagai sumber pemikiran, sehingga dengan Islam sebagai pandangan dunia maupun pikiran-pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang mendasar. Dalam hal ini, multikulturalisme meletakkan hubungan individu dan

masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan menyeimbangkan antara hak-hak individu dengan tanggungjawab sosial (Wahid, 2000). Konsep multikulturalisme menjadi penting dalam realitas kebangsaan, karena multikulturalisme menginginkan adanya bentuk keterbukaan dari masyarakat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang plural. Karena itu, beragam persoalan kemanusiaan dengan berbagai macam ketidakadilan maka akan mendorong terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi (Wahid, 2000).

Instrumen paling memungkinkan untuk membunikan pemikiran multikulturalisme untuk membangun kesadaran akan realitas kebangsaan salah satunya adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, guru menemukan media untuk mengenalkan keanekaragaman kultur yang ada di Indonesia secara lebih mendasar sebagai upaya untuk mencegah adanya konflik horisontal dan disintegrasi bangsa. Disinilah pentingnya studi mengenai peran guru dalam membangun kesadaran adanya keragaman dan kebhinekaan melalui pendidikan multikulturalisme memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam memotret realitas kebangsaan. Sehingga berdasarkan pada uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam membangun pendidikan berkesadaran multikultural di Indonesia. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni: suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar (Sarjono, 2008). Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat Deskriptif-Analitik, yakni: berusaha memaparkan data-data terkait peran guru dalam memberikan pendidikan yang berkesadaran multikultural.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Memahami Multikulturalisme**

Secara etimologi, istilah multikulturalisme berasal dari akar kata: *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau

kebudayaan), yang berarti keberagaman budaya. Istilah multikultural banyak digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (David dan Jary, 1991). Budaya yang harus dipahami adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan budaya yang dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Multikulturalisme merupakan sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas versus mayoritas, yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (*equqlity*), kesetaraan dan keadilan (*justice*). Multikulturalisme jelas memperkaya pluralisme, meskipun tidak bisa disamakan dengannya (Parekh, 1997). Dari sisi historisnya, konsep multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan (Suparlan, 2002). Pluralitas hanya merepresentasikan adanya kemajemukan, sedangkan multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme pada dasarnya melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan prasangka, mereka bebas untuk mencoba mempertahankan apapun dari warisan atau identitas budaya yang mereka

inginkan, serta menghargai dan toleransi dengan hak-hak orang lain (Parekh, 1997).

Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini, setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama. Selanjutnya, demi kesetaraan masa kini, pengakuan adanya pluralisme kultural menjadi suatu tuntutan dari konsep keadilan sosial.

Konsep multikulturalisme dari sisi historisnya bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan untuk memahaminya dan mengembang-luaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam

perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Maka oleh Suparlan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (*ethnic*) atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan (Suparlan, 2002). Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik.

Multikulturalisme bukan sekedar langkah menyuguhkan warna-warni identitas etnik dan budaya. Tetapi membangun kesadaran tentang pentingnya kelompok-kelompok etnik dan budaya itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam ruang bersama. Multikulturalisme menekankan pada usaha lebih sistematis untuk menyertakan pendekatan struktural politik dan ekonomi dalam proses itu. Hal ini berarti bahwa multikulturalisme membutuhkan pengintegrasian pendekatan lainnya selain budaya untuk memungkinkan tema-tema yang relevan di sekitar keadilan ekonomi, persamaan hak, dan toleransi dapat menjadi faktor yang ikut memperkuat multikulturalisme.

Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan prinsip ko-eksistensi (*co-existence*) sebagai dasar multikulturalisme tidaklah cukup. Akan tetapi, dibutuhkan pendekatan yang lebih jauh yakni sebuah pendekatan yang menggeser prinsip koeksistensi ke arah proeksistensi (*pro-existence*). Prinsip proeksistensi ditandai tidak saja oleh hadirnya kualitas hidup berdampingan secara damai, tetapi juga oleh kesadaran untuk ikut menjadi bagian dari usaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok lain. Karena itu, pro-eksistensi menghendaki diakhirinya kebisuan (*silence*) dan pembiaran (*ignorance*) atas nasib kelompok lain. Dengan kata lain, pro-

eksistensi mensyaratkan juga prinsip inklusi, bukan eksklusif (*inclusion, not exclusion*).

Kualitas semacam ini diperlukan untuk memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda itu memiliki kebutuhan untuk menghasilkan integrasi disamping identitas lokal dan partikular yang serba-ragam itu. Selain itu, pro-eksistensi dalam melakukan *affirmative action* dituntut adanya sikap jujur dan percaya. Apabila di tingkat negara bangsa multikulturalisme diperlukan untuk mengelola identitas etnik dan kultural yang serba ragam, maka ditingkat global kecenderungan yang sebaliknya justru terjadi. Globalisasi menghasilkan kecenderungan monokulturalisme yang terutama didorong oleh proses-proses dan praktik-praktik material-rasional yang dibawa oleh ekonomi pasar global.

Multikulturalisme ini sudah menjamur di berbagai entitas kehidupan yang mempengaruhi pola perilaku terutama penanaman kesadaran multikultural dalam bidang pendidikan. Pendidikan multikultural memberikan ruang untuk berdialog antar identitas etnis, agama, gender, bahasa, budaya, serta nilai. Individu dan masyarakat dibiasakan mempresentasikan nilai-nilainya, mengevaluasi tradisi mereka dalam wacana publik yang rasional, serta menafsirkan kembali identitas sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif multikulturalisme, etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Ali, 2003). Apa yang diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat kita berdasarkan atmosfir persahabatan yang murni dengan tidak menghiraukan warna kulit, bahasa, bangsa dan agama.

## **2. Pendidikan Multikultural**

Keberadaan masyarakat multikultural menghendaki sesuatu yang baru yang mendukung keberadaan masyarakat tersebut. Hal ini tampak dalam berbagai usaha yang diupayakan seperti asimilasi, *self-segregation*, integrasi, multikulturalisme dan belakangan muncul, misalnya di Indonesia ide tentang pendidikan multikultural. Masyarakat multikultural haruslah menerima perbedaan kultural yang ada di dalamnya, sekaligus menjamin terciptanya kesempatan yang

sama bagi setiap warganya yang bermuara pada aspek ekonomi, sosial maupun politik.

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam ditinjau dari aspek apapun, baik agama, budaya, bahasa maupun etnik. Keragaman ini memiliki kerentanan terjadinya konflik yang cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi. Satu dasawarsa terakhir saja sudah terjadi berbagai kerusuhan sosial yang menimbulkan banyak kerugian dan pendiskriditan etnis tertentu. Dengan demikian, perlu adanya strategi untuk mengelola segala perbedaan tersebut di atas di berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, agama maupun pendidikan.

Pendidikan multikultural menawarkan suatu alternatif melalui suatu penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya bahasa, agama, status sosial, gender dan ras. Tujuan terpenting dari pendidikan multikultural ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para peserta didik untuk berperilaku humanis, pluralis dan demokratis dalam menyikapi segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

Pada dasarnya, dalam pendidikan multikultural ini guru dituntut tidak hanya menguasai ilmu dan profesional mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dengan pendidikan seperti tersebut di atas diharapkan para peserta didik mampu menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian dan humanistik dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.

### **3. Peran Guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Multikultural**

Pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilai-nilai yang dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional, akan tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dengan penanaman

nilai-nilai tersebut diharapkan peserta didik akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam perilaku keseharian. Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal.

a. Membangun Sikap Persamaan (*Equality*)

Sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir semua teori tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya. Perbedaan yang lebih lanjut dapat ditemukan oleh seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Bikhu Parekh bahwa banyak kajian yang berusaha memahami manusia dalam kaitannya dengan teori substantif persamaan, ini lebih banyak memperhitungkan kelompok marginal atau terpinggirkan (Parekh, 1997). Persamaan mensyaratkan adanya pelibatan, kebebasan dan sama dalam kesempatan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Derajat paling dasar adalah adanya penghormatan pada hak masing-masing individu (Parekh, 1997).

Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, *equality* dan toleransi kepada peserta didik. Dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Tidak boleh satu kelompok mendominasi dan melanggar hak kelompok yang lainnya. Kelompok mayoritas tidak boleh menghegemoni kelompok minoritas. Disinilah penanaman nilai multikultural ini menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia. Peserta didik hendaknya ditanamkan semangat bekerjasama dalam kesedaerajaan, kesamaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama maupun gender.

Menurut Abdurrahman Wahid, kata kunci dalam kehidupan berbangsa adalah adanya persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihormati keberadaannya, persamaan mendapatkan kesempatan, dan perlakuan yang sama atas hukum, apapun budaya, ras, etnis, ras dan agama. Disinilah peserta didik bisa mengasah rasa

sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas dan menggerakkan kelompok kultur yang mayoritas untuk agar mempunyai perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok atau kultur lainnya (Parekh, 1997).

b. Mendorong Demokrasi Substansial

Keragaman yang ada di Indonesia seringkali menumbuhkan konflik berkekerasan. Konflik yang seharusnya hanya antar perbedaan gagasan-pun telah merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial dan ekonomi. Disinilah dunia pendidikan yang berwatak multikultural harusnya mampu mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sehingga konflik bisa dikelola dengan baik. Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat. Kebutuhan akan konsensus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dari kesamaan, dan hak individu.

Guru dengan pendidikan multikulturalnya selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara. Pendidikan multikultural menginginkan adanya demokrasi yang substansional, tidak hanya prosedural. Demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya seremonial. Karena demokrasi yang demikian akan selalu mendorong adanya persamaan warga dalam hukum.

Pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Pendidikan harus mampu membangun sikap hidup yang multikultural bukan monokultural, cara hidup pambaruan bukan pembauran, pro-eksistensi bukan ko-eksistensi, bukan separasi tetapi interaksi. Guru melalui pendidikan multikultural merupakan sarana yang paling baik untuk proses pembudayaan. Peserta didik akan terlatih dan terbangun kesadarannya untuk bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam kehidupan mereka.

c. Membangun *Gender Equality*

Gender merupakan suatu sifat yang diletakan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selamanya, dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan bukan

merupakan kodrat dari Tuhan (Umar, 1999). Lebih lanjut, berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu: marginalisasi, sub-ordinasi, *stereotype*, kekerasan (*violence*) dan beban kerja (*double burden*).

Akibat dari ketidakadilan tersebut terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial jika dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dalam bidang keagamaan (Rachman, 2001). Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip *kulliyah al-khams*, yang merupakan tujuan utama syariat (*maqashid as-syariat*). Prinsip *al-kulliyah al-khams* memberi penekanan kesamaan dan kesetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan serta hak-hak mereka yang vital. Perempuan juga memiliki potensi untuk bisa memainkan peran-peran yang selama ini diklaim hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak di antara kaum perempuan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik dan publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial (Muhammad, 1994).

Guru dengan pendidikan multikultural seharusnya mendasarkan kepada al-Qur'an dalam membangun kesadaran dan menanamkan kesetaraan keada peserta didik, karena al-Qur'an banyak memuat konsep kesetaraan gender. *Pertama*, al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama disegala bidang kehidupan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari dimensi: *pertama*, hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak-hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik. *Kedua*, dari segi ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan balasan ketika melakukan kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. *Ketiga*, dari segi hak-hak dalam keluarga, Islam yang memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan (Wahid, 1999).

Guru seharusnya menekankan pemahaman teks-teks keagamaan dengan pendekatan sosiologis-kontekstual, karena hal ini berkaitan dengan persoalan partikular. Seiring dengan perkembangan evolutif kesadaran mereka, bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan mengalami pergeseran yang cukup signifikan serta perubahan yang mendasar sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-hak asasi dasar (*basic rights*) dan keadilan sebagai warga negara secara personal. Semangat dari penafsiran teks-teks agama hendaknya berdasarkan pada prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan dan kerahmatan, tanpa harus terbatas oleh sekat gender, jenis kelamin dan sistem sosial (Rachman, 2002).

Pada titik ini, pemikiran multikultural dalam pendidikan menemukan titik temunya. Berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan multikultural haruslah diarahkan untuk mencari keadilan gender. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dikalangan umat Islam harus berdasarkan pada kerangka keseimbangan (*tawazun, balance*) dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan kesejarahan dan sosiologis, pendekatan *maslahat* dan pendekatan ekonomi. Dengan demikian pendidikan multikultural akan mampu membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi berhadapan teks-teks keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melihat kembali prinsip *kulliyah al-khams* serta *maqashid syar'i* sebagai landasan untuk menetralkan wacana keagamaan yang memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan serta menjauhkan dari bias gender. Guru dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun pemahaman yang humanis dan berwawasan gender, agar perempuan mempunyai peran dan kebebasan dalam berbagai sektor kehidupan.

James A. Banks (1993, 1994-a), mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa) (Sumarni, 2010), yaitu:

- 1) Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*).
- 2) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*).

- 3) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*).
- 4) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*).
- 5) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*).

Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (Single Group Studies) dan pendekatan perspektif ganda (Multiple Perspectives Approach). Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal.

### C. SIMPULAN

Berbagai krisis multidimensi yang ada di Indonesia, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di masyarakat kita. Keragaman kultur seharusnya bukan menjadi penyebab adanya diskriminasi, ketidakadilan, kecurigaan dan berbagai pelanggaran HAM, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Dengan penerapan pendidikan multikultural, diharapkan guru mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di tengah realitas kebangsaan yang penuh dengan kebhinekaan. Adapun peran guru dalam membangun pendidikan berkesadaran multikultural dapat dicapai melalui aktivitas sebagai berikut. 1) membangun Sikap Persamaan (*Equality*). Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, *equality* dan toleransi kepada peserta didik. Dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Peserta didik hendaknya ditanamkan semangat bekerjasama dalam kesedaerajatan, kesamaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama maupun gender; 2) mendorong demokrasi substansial. Keragaman yang ada di Indonesia seringkali menumbuhkan konflik berkekerasan. Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat. Kebutuhan akan konsesnsus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar

prinsip dari kesamaan, dan hak individu. Selain itu, pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada; 3) membangun *Gender Equality*. Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip *kulliyah al-khams*, yang merupakan tujuan utama syariat (*maqashid as-syariat*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M., (2003). *Teologi Pluralis-Multikultural*, Jakarta: Kompas.
- Huda, MH. N. (2005). *Multikulturalisme Dalam Bayang-Bayang Histografi Resmi Nasional*, Sururin (ed.), Bandung: Nuansa.
- J. David dan Julia J., (1991). "Multiculturalism". *Dictionary of Sociology*, New York: Harper.
- Latif, Y., (2011). *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F., (2003). "Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antar Etnis dan Agama di Indonesia. Pencegahan dan pemecahan," dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Jakarta: INIS.
- Muhammad, H., (1994). *Fiqh Perempuan. Refleksi Kyai Atas Wacana aan Gender*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Parekh, B., (1997). "National Culture and Multiculturalism" dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation*, London: Sage Publications.
- Rachman, B.M., (2001). *Islam Pluralis. Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina.
- Rozi, Syafuan dkk., (2006). *Kekerasan Komunal; Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suparlan, P., (2002). "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 6.
- Umar, N. (1999). *Persepektif Gender Dalam Al-Qur'an, Disertasi PPs IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.

- Wahid, A., (1999). "Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan. Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Wahid, A., (2000). *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS.
- Yaqin, M. A., (2005). *Pendidikan Multikultural. Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.